



Article Informations  
Corresponding Email:  
karaengyusi@gmail.com

Received: 09/05/2025; Accepted:  
19/09/2025; Published: 15/10/2025

## **PERAN SPECIAL COMMITTEE ON DECOLONIZATION THE UNITED NATION DALAM MENGAWAL PROSES DEKOLONISASI KALEDONIA BARU 2018-2021**

**Yusy Luna A.C Karaeng**

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas peran Special Committee on Decolonization Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mendampingi proses dekolonisasi Kaledonia Baru selama periode 2018–2021, yang ditandai oleh tiga referendum kemerdekaan sesuai dengan kesepakatan Nouméa Accord. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Special Committee on Decolonization dalam aspek informasi, forum, normatif, penciptaan aturan, pengawasan aturan, operasional, dan pembentukan ide sebagai bagian dari mekanisme kerja organisasi internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Special Committee on Decolonization dalam proses dekolonisasi Kaledonia Baru selama periode 2018–2021 menghadapi sejumlah tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Dinamika politik lokal yang kompleks, tingkat partisipasi masyarakat yang fluktuatif, serta situasi global seperti pandemi COVID-19 menjadi faktor-faktor yang turut memengaruhi jalannya proses dekolonisasi. Referendum tahun 2021, yang berlangsung di tengah kondisi pandemi dan diboikot oleh sebagian masyarakat Kanak, mencerminkan masih rentannya legitimasi dan inklusivitas proses politik di wilayah tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses dekolonisasi di Kaledonia Baru masih berada dalam fase transisi yang memerlukan penguatan internal agar lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Special Committee On Decolonization, PBB, Dekolonisasi, Kaledonia Baru

### *Abstract*

*This research discusses the role of the United Nations Special Committee on Decolonization in assisting the decolonization process of New Caledonia during the 2018-2021 period, which was marked by three independence referendums in accordance with the Nouméa Accord. This research aims to analyze the role of the Special Committee on Decolonization in the aspects of information, forum, normative,*

*rule creation, rule supervision, operational, and idea generation as part of the work mechanism of international organizations. The research uses descriptive qualitative methods with literature study data collection techniques.*

*The results showed that the Special Committee on Decolonization's involvement in New Caledonia's decolonization process during the 2018-2021 period faced a number of challenges, both internally and externally. Complex local political dynamics, fluctuating levels of community participation, and global situations such as the COVID-19 pandemic are factors that have influenced the course of the decolonization process. The 2021 referendum, which took place in the midst of a pandemic and was boycotted by some Kanak communities, reflects the vulnerability of the legitimacy and inclusiveness of the political process in the region. This research shows that the decolonization process in New Caledonia is still in a transitional phase that requires internal strengthening to be more inclusive and sustainable.*

*Keyword : Special Committee On Decolonization, The United Nation, Dekolonisasi, Kaledonia Baru*

## **PENDAHULUAN**

Dekolonisasi merupakan perjalanan panjang menuju kebebasan, sebuah proses yang bertujuan melepaskan negara-negara yang terjajah dari cengkeraman kekuasaan kolonial dan membebaskan mereka untuk berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat dan mandiri.<sup>1</sup> Ini bukan sekadar peralihan kekuasaan, melainkan transformasi mendalam yang melibatkan pembebasan dari kontrol politik, ekonomi, dan sosial yang dipaksakan oleh penjajah.

Proses dekolonisasi mendorong pembentukan identitas nasional yang kuat, dimana rakyat dapat menentukan nasib mereka sendiri dan membangun masa depan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Ini juga menuntut pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat, dimana setiap individu memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka tanpa intervensi atau eksploitasi dari pihak luar.<sup>2</sup>

Setelah Perang Dunia II, dekolonisasi telah menjadi isu sentral dalam sejarah global ketika dunia menyaksikan gelombang gerakan kemerdekaan yang menggelora di berbagai penjuru. Setelah berakhirnya perang, semangat pembebasan membara, didorong oleh keinginan untuk mengakhiri

---

<sup>1</sup> Laenui, Poka. "Processes of decolonization." *Reclaiming Indigenous voice and vision* (2000), hlm.1.

<sup>2</sup> Lewis Gordon, *Freedom, Justice, and Decolonization* (New York: Routledge, 2020; eBook, dipublikasikan 31 Desember, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781003112594>.

penindasan kolonial dan membangun negara-negara merdeka yang berdaulat.<sup>3</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mendukung proses dekolonisasi, menjadi wadah bagi negara-negara yang baru merdeka untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka.<sup>4</sup> PBB menjadi simbol harapan bagi dunia yang bebas dari penjajahan, dimana setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Meskipun dekolonisasi membawa harapan bagi dunia yang bebas dari penjajahan, tetapi proses dekolonisasi di berbagai belahan dunia sering kali menghadapi ketegangan yang signifikan sebagai akibat dari upaya kekuatan kolonial untuk mempertahankan kontrol atas wilayah jajahannya masing-masing. Banyak negara penjajah yang tidak ingin untuk melepaskan kekuasaan yang telah memberikan mereka berbagai keuntungan, baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, maupun strategis selama bertahun-tahun.<sup>5</sup> Tindakan untuk memelihara kendali ini menciptakan konflik antara kekuatan kolonial dan masyarakat lokal yang berusaha dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.

Dalam banyak situasi, pemerintah kolonial berusaha membentuk pemerintahan yang bersahabat dibekas koloni dengan menunjuk pemimpin lokal yang dianggap loyal atau mendukung kepentingan kolonial. Namun, pendekatan ini sering gagal, karena masyarakat lokal merasa teralienasi dan tidak diakui dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan dan protes. Ketegangan yang muncul sering kali berujung pada kekerasan, baik antara penjajah dan penduduk lokal maupun diantara komunitas dalam masyarakat itu sendiri.<sup>6</sup>

Penjajah mungkin menggunakan kekuatan militer untuk menekan gerakan kemerdekaan, sementara kelompok lokal yang memperjuangkan

---

<sup>3</sup> Maldi Imam, "Dekolonisasi," *Jurnal Studia Administrasi .MM Dekolonisasi* 6, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.47995/jian.v6i1.204>.

<sup>4</sup> Anna Lovelace. "When Global Governance Wins: The Role of the United Nations in Decolonization." *Merced Undergraduate Research Journal*, hlm. 75.

<sup>5</sup> Raymond F. Betts. *Decolonization: A Brief History of the Word. Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s-1970s*, 2012, hlm. 23-38. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h2zm.5>.

<sup>6</sup> Karl Hack, "Decolonization and Violence in Southeast Asia: Crises of Identity and Authority," dalam *Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s-1970s* (Brill, 2012), hlm. 137-166.

hak-hak mereka dapat terlibat dalam konflik bersenjata atau demonstrasi yang berakhir dengan kekerasan. Ketegangan yang meningkat ini tidak hanya memperpanjang proses kemerdekaan, tetapi juga dapat melemahkan pemerintahan penerus yang ada, membuat transisi menuju kemerdekaan menjadi lebih rumit.

Pada tahun 1960, PBB mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri melalui Resolusi Majelis Umum 1514 (XV),<sup>7</sup> yang berisi resolusi ini dengan sungguh-sungguh memproklamasikan perlunya mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan cepat dan tanpa syarat. Resolusi ini menetapkan bahwa: Penaklukan, dominasi, dan eksploitasi bangsa-bangsa oleh bangsa asing merupakan penyangkalan hak asasi manusia yang fundamental, bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan merupakan penghalang bagi promosi perdamaian dan kerja sama dunia.

Semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri; berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Ketidacukupan kesiapan politik, ekonomi, sosial, atau pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan. Semua tindakan bersenjata atau tindakan represif dari semua jenis yang ditujukan terhadap bangsa-bangsa yang bergantung harus dihentikan untuk memungkinkan mereka untuk secara damai dan bebas menjalankan hak mereka untuk kemerdekaan penuh, dan integritas wilayah nasional mereka harus dihormati.

Langkah-langkah segera harus diambil, di Wilayah Perwalian dan Wilayah Non-Pemerintah atau semua wilayah lain yang belum mencapai kemerdekaan, untuk menyerahkan semua kekuasaan kepada rakyat wilayah-wilayah tersebut, tanpa syarat atau pengecualian, sesuai dengan kehendak dan keinginan mereka yang diungkapkan secara bebas, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, kepercayaan, atau warna kulit, untuk

---

<sup>7</sup> "Special Committee on Decolonization." United Nations, diakses November 24, 2024, [https://www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/about.General Assembly-Fifteenth Session](https://www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/about.General%20Assembly-Fifteenth%20Session), hlm. 2.

memungkinkan mereka menikmati kemerdekaan dan kebebasan penuh. Setiap upaya yang bertujuan untuk mengganggu sebagian atau seluruh persatuan nasional dan integritas teritorial suatu negara tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Semua negara harus menaati dengan setia dan ketat ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal HAM, dan Deklarasi ini berdasarkan persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri semua negara, dan menghormati hak berdaulat semua bangsa dan integritas teritorial mereka. Berdasarkan resolusi MA 1654 (XVI),<sup>8</sup> C-24 kemudian diberi mandat untuk memeriksa penerapan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Bangsa Kolonial, serta untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait kemajuan dan pelaksanaan deklarasi tersebut. Resolusi menetapkan bahwa:

1. Dengan sungguh-sungguh mengulangi dan menegaskan kembali tujuan dan prinsip yang terkandung dalam deklarasi mengenai pemberian kemerdekaan kepada negara-negara jajahan dan rakyatnya yang tercantum dalam resolusinya 1514 (XV) tanggal 14 Desember 1960.
2. Memanggil negara-negara yang bersangkutan untuk segera mengambil tindakan dengan tujuan penerapan deklarasi secara setia dan implementasinya.
3. Memutuskan untuk membentuk komite khusus yang terdiri dari tujuh belas anggota yang akan dicalonkan oleh presiden majelis umum pada sesi saat ini.
4. Meminta komite khusus untuk memeriksa penerapan deklarasi, memberikan saran dan rekomendasi mengenai kemajuan dan sejauh mana implementasi deklarasi, dan melaporkan kepada majelis umum pada sesi ketujuh belasnya.
5. Menugaskan komite khusus untuk melaksanakan tugasnya dengan menggunakan semua cara yang akan dimiliki sesuai dengan prosedur

---

<sup>8</sup> Ibid.

dan cara yang akan diadopsi untuk pelaksanaan fungsinya secara tepat.

6. Memberi wewenang kepada komite khusus untuk mengadakan pertemuan di luar Markas Besar PBB, kapan saja dan dimana pun pertemuan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan fungsinya yang efektif, dengan berkonsultasi dengan pihak berwenang yang relevan.
7. Mengundang pihak berwenang yang bersangkutan untuk memberikan kerja sama penuh kepada komite khusus dalam melaksanakan tugasnya.
8. Meminta Dewan Perwalian, Komite Informasi dari Wilayah Non-Swatantra, dan badan-badan khusus yang bersangkutan untuk membantu komite khusus dalam pekerjaannya dibidang masing-masing.
9. Meminta sekretaris jenderal untuk menyediakan semua fasilitas dan personel yang diperlukan bagi komite khusus untuk pelaksanaan resolusi ini.

Special Committee on Decolonization (Komite Dekolonisasi) atau yang dikenal sebagai C-24, didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1961 sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pengawasan dan dukungan dalam proses dekolonisasi yang semakin penting di seluruh dunia.<sup>9</sup> Konsep atau gagasan dekolonisasi muncul pada saat terdapat dorongan signifikan pasca-perang untuk mengakhiri praktik kolonial.

Special Committee on Decolonization berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial ke dalam agenda dekolonisasi, menciptakan suasana dimana negara-negara yang terjajah dapat mengejar aspirasi mereka dengan dukungan yang memadai dari lembaga internasional.<sup>10</sup> Terdapat dua metode utama menuju kemerdekaan yang diakui dalam kerangka PBB. Metode pertama adalah melalui Mandat

---

<sup>9</sup> Seymour M. Finger, "A New Approach to Colonial Problems at the United Nations," *International Organization*, vol. 26, no. 1, Winter 1972, abstract, Cambridge University Press, <https://www.jstor.org/stable/2705958>.

<sup>10</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2016, [www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](http://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

PBB sebagai bagian dari Dewan Perwalian, yang diharapkan dapat menawarkan proses kemerdekaan yang lebih stabil dan damai karena keterlibatan serta pengawasan langsung dari sistem PBB yaitu Special Committee Decolonization. Sebaliknya, metode kedua adalah kemerdekaan yang diberikan secara langsung oleh kekuatan kolonial, yang sering kali disertai dengan kekerasan, meskipun terdapat retorika yang menyatakan bahwa proses tersebut akan berlangsung dengan damai.<sup>11</sup>

Sebagai salah satu wilayah yang masih berada dibawah administrasi kolonial, Kaledonia Baru merupakan contoh nyata proses dekolonisasi yang menjadi perhatian Special Committee on Decolonization dari tahun 1986, ketika Kaledonia Baru memilih bergabung dalam badan internasional ini. Kaledonia Baru adalah sebuah kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan dan saat ini diakui sebagai wilayah Laut Seberang Prancis (*Territoire d'Outre-mer*),<sup>12</sup> yang menegaskan statusnya sebagai bagian dari administrasi Prancis. Kaledonia Baru secara resmi menjadi koloni Prancis pada tahun 1853.<sup>13</sup> Prancis mengklaim Kaledonia Baru berlandaskan kepentingan strategis dan ekonominya di wilayah Pasifik serta untuk mencegah Inggris mengklaim wilayah tersebut.<sup>14</sup> Klaim ini dilakukan dibawah pemerintahan Napoleon III, dengan tujuan untuk memperluas kekuasaan kolonial.

Prancis yang membangun imperium kolonial yang sangat berpengaruh di dunia antara abad ke-17 hingga akhir abad ke-20, menjajah banyak wilayah di berbagai belahan bumi termasuk Pasifik Selatan.<sup>15</sup> Dalam perjalanan sejarah kolonialnya, Prancis memiliki kedudukan strategis yang signifikan di Pasifik Selatan, terutama melalui wilayah Kaledonia Baru, yang

---

<sup>11</sup> "The Special Committee on Decolonization: C-24, Committee Primer, Decolonization and the United Nations." Mesa Community College, diakses November 28, 2024, <https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/academic-departments/social-science/C24%20Instructions.pdf>.

<sup>12</sup> Alawiyah. Kajian Historis Noumea Accord 1998 Di Kaledonia Baru. Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 8.

<sup>13</sup> David A. Chappell, "Frontier Ethnogenesis: The Case of New Caledonia," *Journal of World History* 4, no. 2 (Fall 1993): 307-324, <https://www.jstor.org/stable/20078566>.

<sup>14</sup> Jean-Yves Faberon, "Instability and Stability in New Caledonia," in *Politics, Development and Security in Oceania*, 77-82 2013, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt18z.14>

<sup>15</sup> Edwin R. A. Seligman. "The French Colonial Fiscal System." *Publications of the American Economic Association*, 3rd series, vol. 1, no. 3, *Essays in Colonial Finance by Members of the American Economic Association*, Aug. 1900, hlm. 21-39. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/2485789>.

menjadi salah satu koloni terakhir dan yang masih berada dibawah kekuasaannya hingga sampai pada saat ini.

Penduduk asli Kaledonia Baru, khususnya Suku Kanak telah menuntut kemerdekaan bagi Kaledonia Baru jauh sebelum bergabung dengan Special Committee on Decolonization. Pada tahun 1979, kelompok pro-kemerdekaan (Kanak Independence Front) mengajukan permohonan kepada Forum Pasifik Selatan untuk mendesak Komisi PBB tentang dekolonisasi agar mendaftarkan Kaledonia Baru sebagai wilayah non-otonom. Tujuannya adalah untuk memenuhi syarat bagi proses dekolonisasi dan memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri bagi Rakyat Kanak. Permohonan tersebut mencerminkan dorongan kuat dari Rakyat Kanak untuk memperoleh otonomi dan hak menentukan nasib sendiri.

Pada tahun 1998, dibuatlah *Nouméa Accord* yang ditandatangani oleh pemimpin Prancis dan Kaledonia Baru.<sup>16</sup> Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada Kaledonia Baru dan menetapkan kerangka untuk proses dekolonisasi melalui serangkaian referendum. Referendum pertama diadakan pada tahun 2018, di mana mayoritas pemilih memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis. Referendum berikutnya pada tahun 2020 juga menunjukkan hasil yang serupa, meskipun dukungan terhadap kemerdekaan meningkat. Pada tahun 2021, referendum ketiga diadakan dengan hasil yang sangat didominasi oleh suara yang menolak kemerdekaan, namun partisipasi rendah karena masyarakat Kanak, sebagai penduduk asli, memboikot pemungutan suara ketiga ini akibat masa berkabung pandemi Covid-19.

Hasil referendum di Kaledonia Baru menunjukkan kecenderungan mayoritas untuk tetap bersama Prancis, sementara rendahnya partisipasi dalam referendum 2021 akibat boikot masyarakat Kanak menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi proses dekolonisasi. Situasi ini menimbulkan tantangan atau hambatan dalam menilai apakah referendum benar-benar mencerminkan kehendak seluruh penduduk, terutama

---

<sup>16</sup> David A. Chappell. "The Noumea Accord: Decolonization without Independence in New Caledonia?" *Pacific Affairs*, vol. 72, no. 3, Autumn 1999, hlm. 373.

masyarakat asli yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah kondisi tersebut dapat menjadi hambatan bagi peran Special Committee on Decolonization dalam memastikan dekolonisasi yang sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri.

Dalam *A New Approach to Colonial Problems at the United Nations* karya Seymour M. Finger mengangkat isu mengenai upaya internasional dalam menyelesaikan masalah kolonialisme melalui pendekatan yang lebih konstruktif dan inklusif.<sup>17</sup> Penulis dalam jurnal ini menekankan bahwa dekolonisasi bukan sekadar pengakhiran kekuasaan kolonial, melainkan juga suatu proses rekonstruksi yang mendalam dimana negara-negara yang baru merdeka diberikan kesempatan untuk merumuskan identitas politik dan sosial mereka sendiri. Finger menyoroti pentingnya peran PBB sebagai mediator yang membantu negara-negara terjajah untuk memperoleh keadilan dan kedaulatan tanpa harus terjebak dalam ketegangan internasional.

Dalam *Finishing the Job': The UN Special Committee on Decolonization and the Politics of Self-Governance* karya Oliver Turner membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengawal proses dekolonisasi global, dengan fokus khusus pada Special Committee on Decolonization.<sup>18</sup> Jurnal ini menyoroti bagaimana PBB, melalui Komite Dekolonisasi, berperan dalam menangani berbagai tantangan dan krisis kolonial, termasuk upaya memfasilitasi kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri (self-determination) bagi wilayah-wilayah yang masih dijajah. Selain itu, jurnal ini juga membahas bagaimana dinamika geopolitik selama Perang Dingin memengaruhi pendekatan PBB terhadap dekolonisasi, termasuk intervensi dalam konflik-konflik kolonial dan tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang masih mempertahankan sistem kolonial.

---

<sup>17</sup> Seymour M. Finger, "A New Approach to Colonial Problems at the United Nations," *International Organization*, vol. 26, no. 1, Winter 1972, abstract, Cambridge University Press, <https://www.jstor.org/stable/2705958>.

<sup>18</sup> Oliver Turner, "Finishing the Job': The UN Special Committee on Decolonization and the Politics of Self-Governance", *Third World Quarterly*, vol. 34, no. 7, 2013, hlm. 1-17, University of Florida State.

Dalam *The United Nations, Decolonization, And Self Determination In Cold War Sub-Saharan Africa* karya Christopher O' Sullivan membahas peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengawal proses dekolonisasi di Afrika Sub-Sahara selama periode Perang Dingin.<sup>19</sup> Jurnal ini menyoroti bagaimana PBB berperan dalam menangani berbagai krisis kolonial, termasuk intervensi dalam krisis Kongo pada awal 1960-an dan upaya mengatasi rezim minoritas kulit putih di Rhodesia Selatan (Zimbabwe), Afrika Selatan, dan Namibia. Selain itu, jurnal ini juga membahas bagaimana dinamika geopolitik antara blok Barat dan Timur memengaruhi pendekatan PBB terhadap dekolonisasi di kawasan tersebut.

Dalam *New Caledonia's Independence Referendum: Local and Regional Implications* karya Denise Fisher ini penulis mengangkat isu mengenai dampak referendurnya terhadap kemerdekaan Kaledonia Baru, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses dekolonisasi wilayah tersebut.<sup>20</sup> Jurnal ini membahas analisis mengenai proses politik yang terjadi dalam referendum kemerdekaan Kaledonia Baru, termasuk peran penting yang dimainkan oleh aktor lokal dan internasional dalam menentukan hasilnya, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kaledonia Baru dalam mencapai kemerdekaan penuh, baik dari segi politik, sosial, maupun ekonomi serta dampak referendurnya terhadap stabilitas regional dan hubungan antara Kaledonia Baru dengan negara-negara tetangga di Pasifik.

## **PEMBAHASAN**

### **Special Committee on Decolonization sebagai Informational: Gathering, Analyzing, and Disseminating Data**

Special Committee on Decolonization menjalankan peran utamanya sebagai pusat pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi terkait

---

<sup>19</sup> Christopher O'Sullivan, "The United Nations, Decolonization, and Self-Determination in Cold War Sub-Saharan Africa, 1960-1994", *Journal of Third World Studies*, vol. 22, no. 2, 2005, hlm. 103-120, University of Florida Press.

<sup>20</sup> Denise Fisher, "New Caledonia's Independence Referendum: Local and Regional Implications." *JSTOR*, 1 May 2019. <https://www.jstor.org/stable/resrep19787>.

proses dekolonisasi di Wilayah-Wilayah yang Belum Merdeka (Non-Self-Governing Territories/NSGTs). Dalam menjalankan fungsi ini, Special Committee on Decolonization mengkaji perkembangan politik, ekonomi, dan aspek lainnya di wilayah tersebut dengan memastikan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi penduduknya dihormati. Kajian ini mencakup analisis terhadap kebijakan pemerintahan penguasa, perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta hambatan yang dihadapi dalam proses dekolonisasi. Dengan melakukan evaluasi ini, komite dapat menilai sejauh mana kemajuan telah dicapai dalam mewujudkan hak-hak penduduk wilayah tersebut untuk menentukan masa depan mereka sendiri.<sup>21</sup>

Selain itu, komite mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang masih ada dalam proses dekolonisasi dengan mengumpulkan laporan dan data dari berbagai sumber, termasuk pemerintah administrasi, organisasi internasional, serta masyarakat sipil di wilayah terkait. Berdasarkan analisis ini, komite memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat proses dekolonisasi, termasuk dukungan politik, ekonomi, atau sosial yang diperlukan oleh wilayah-wilayah tersebut. Dengan pendekatan berbasis data, komite berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi proses penentuan nasib sendiri, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup>

Pada tahun 2018, perhatian utama tertuju pada referendum penentuan nasib sendiri yang dijadwalkan pada 4 November 2018. Dalam perannya sebagai pengumpul dan penganalisis informasi, Special Committee on Decolonization mengamati dan mengkaji jalannya referendum ini serta memastikan bahwa laporan terkait proses dan hasilnya tersedia bagi PBB dan komunitas internasional. Komite melakukan analisis terhadap informasi

---

<sup>21</sup> United Nations, General Assembly. Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. 22 Juli 2020, hlm. 6.

<sup>22</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples., 19 Juni 2018, AC.109/2018/L.22, hlm. 4.

yang diberikan kepada masyarakat Kaledonia Baru mengenai opsi penentuan nasib sendiri, serta bagaimana transparansi dan aksesibilitas informasi tersebut memengaruhi keputusan pemilih. Komite juga meninjau berbagai faktor yang dapat memengaruhi jalannya referendum, termasuk aspek hukum, sosial, dan politik.<sup>23</sup>

Setelah referendum berlangsung, pada 19 Desember 2018, Special Committee on Decolonization melakukan analisis terhadap hasil dan dampaknya terhadap dinamika politik di Kaledonia Baru. Hasil referendum menunjukkan bahwa 56,4% pemilih menolak kemerdekaan, sementara 43,6% mendukungnya. Komite mengkaji pola suara, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih, serta bagaimana hasil ini mencerminkan perubahan preferensi politik di wilayah tersebut. Komite juga mengevaluasi perbedaan interpretasi hukum terkait daftar pemilih yang memenuhi syarat, yang memicu perdebatan politik dan sosial.<sup>24</sup>

Pada tahun 2020, Special Committee on Decolonization kembali berperan dalam referendum kedua yang berlangsung pada 4 Oktober 2020. Referendum ini diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19, yang berdampak pada persiapan, strategi kampanye, serta mobilitas pemantau internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa 53,26% pemilih memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis, sementara 46,74% mendukung kemerdekaan penuh. Komite memverifikasi jalannya proses referendum dan memastikan bahwa informasi mengenai hasilnya disampaikan secara akurat kepada komunitas internasional. Analisis lebih lanjut dilakukan pada 21 Desember 2020, dengan fokus pada bagaimana pandemi memengaruhi partisipasi politik dan aksesibilitas pemilih. Komite mengkaji perubahan strategi kampanye akibat pembatasan sosial serta menilai apakah referendum tetap berlangsung sesuai standar demokrasi dan transparansi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> United Nations. Report of the United Nations Visiting Mission to New Caledonia, 12–16 and 19 March 2018: Preparation of the Referendum Envisaged by the Nouméa Accord. A/AC.109/2018/20, 2 April 2018, hlm. 6–8.

<sup>24</sup> Denise Fisher, New Caledonia's Independence Referendum: Local and Regional Implications, JSTOR, vol. 54, no. 2, 1 Mei 2019, hlm. 4, <https://www.jstor.org/stable/resrep19787>.

<sup>25</sup> United Nations. Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Question of New Caledonia., 21 Desember. 2020, A/RES/75/115, hlm. 3–7.

Pada tahun 2021, referendum ketiga diadakan pada 12 Desember, dengan hasil yang menunjukkan 96,5% pemilih menolak kemerdekaan.<sup>26</sup> Namun, partisipasi pemilih menurun drastis akibat boikot oleh kelompok pro-kemerdekaan. Special Committee on Decolonization melakukan evaluasi pada 16 Desember 2021, menyoroti dampak politik dari boikot serta kredibilitas hasil referendum. Komite mengamati bagaimana dinamika ini memengaruhi stabilitas politik di Kaledonia Baru dan potensi perundingan lebih lanjut terkait status wilayah tersebut. Komite juga mengkaji laporan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kaledonia Baru, Prancis, serta organisasi internasional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Forum Kepulauan Pasifik lainnya. Fokus kajian meliputi tantangan yang dihadapi masyarakat Kanak yaitu representasi politik yang tidak seimbang.<sup>27</sup>

Laporan mengenai hak masyarakat adat menjadi perhatian utama dalam konteks implementasi Kesepakatan Nouméa dan proses dekolonisasi Kaledonia Baru. Special Committee on Decolonization terus memantau proses perkembangan dekolonisasi yang terjadi ini dan melaporkannya kepada PBB guna memastikan bahwa proses dekolonisasi berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum internasional. Evaluasi mendalam juga dilakukan untuk menilai prospek politik dan ekonomi jangka panjang bagi Kaledonia Baru dalam kaitannya dengan hasil referendum terakhir.<sup>28</sup>

### **Special Committee on Decolonization sebagai Forum: Providing a Place for Exchange of Views and Decision-Making**

Special Committee on Decolonization menjalankan peran utamanya juga sebagai forum internasional yang mempertemukan Pemerintah Kaledonia Baru, Prancis sebagai kekuatan penguasa, serta perwakilan rakyat Kanak untuk membahas langkah-langkah konkret dalam proses

---

<sup>26</sup> "Referendum 3 of 3: New Caledonia Won't Become Independent." *Political Geography Now*, 17 Desember. 2021, [www.polgeonow.com/2021/12/did-new-caledonia-gain-independence-referendum-2021.html](http://www.polgeonow.com/2021/12/did-new-caledonia-gain-independence-referendum-2021.html).

<sup>27</sup> United Nations. *Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Question of New Caledonia*. Agenda 63., 16 Desember. 2021, A/RES/76/98, hlm. 4–7.

<sup>28</sup> *Ibid.*

dekolonisasi. Komite memastikan bahwa setiap pihak memiliki akses terhadap platform diskusi yang memungkinkan mereka menyampaikan pandangan dan kepentingan masing-masing. Melalui pertemuan resmi, sidang khusus, serta rekomendasi kepada PBB, komite berusaha mendorong keputusan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan kehendak rakyat Kaledonia Baru. Semua informasi, analisis data, dan diskusi yang terjadi dalam forum ini kemudian dilaporkan kepada PBB sebagai bagian dari pemantauan proses dekolonisasi.<sup>29</sup>

Setelah referendum penentuan nasib sendiri yang berlangsung pada tahun 2018, Special Committee on Decolonization mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kaledonia Baru dan Prancis untuk mengevaluasi proses politik pasca-referendum. Fokus utama diskusi adalah mengidentifikasi tantangan dalam implementasi hasil referendum serta mengeksplorasi mekanisme hukum dan politik yang dapat diterapkan guna menjamin stabilitas wilayah.<sup>30</sup> Dalam forum ini, komite juga menyoroti perlunya keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, terutama masyarakat adat Kanak, guna memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pihak.

Special Committee on Decolonization dalam forum diskusi menerima tiga permintaan dari komunitas lokal untuk mengajukan petisi kepada PBB mengenai isu Kaledonia Baru. Permintaan ini diajukan oleh tiga kelompok utama, yaitu Congress of New Caledonia, Mouvement des Groupes Révolutionnaires Koutumiers Kanaks, dan Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS). Semua rekomendasi hasil diskusi ini kemudian disampaikan kepada PBB untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan dekolonisasi lebih lanjut. Komite juga mengajukan rekomendasi kepada PBB terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah

---

<sup>29</sup> Roy Christman, *The United Nations and Decolonization: A Study of the Formation, Organization, and Effectiveness of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, The Pennsylvania State University, 1974, Proquest Dissertations & Theses, hlm. 1-24.

<sup>30</sup> United Nations. *Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: New Caledonia*. 8 Maret. 2019, AC.109/2019/11, hlm. 1–21.

ketegangan politik di wilayah tersebut, memastikan bahwa hasil referendum tidak memicu ketidakstabilan jangka panjang.<sup>31</sup>

Referendum kedua yang berlangsung pada tahun 2020 membawa perubahan dalam dinamika politik Kaledonia Baru. Special Committee on Decolonization kembali menjadi forum dalam menganalisis dampak referendum terhadap administrasi publik dan sektor ekonomi. Pertemuan dengan delegasi dari Pemerintah Kaledonia Baru dan Prancis membahas aspek kebijakan fiskal, regulasi investasi, serta perlindungan hak-hak komunitas adat dalam menghadapi perubahan politik pasca-referendum. Semua pembahasan ini kemudian didokumentasikan dalam laporan resmi yang diajukan kepada PBB untuk memastikan bahwa proses dekolonisasi terus mendapat pengawasan internasional.<sup>32</sup>

Tantangan akibat pandemi Covid-19 turut menjadi fokus utama dalam diskusi pada periode yang sama. Komite membahas bagaimana pembatasan sosial dan disrupsi ekonomi global memengaruhi stabilitas politik Kaledonia Baru. Strategi untuk meminimalkan dampak negatif pandemi terhadap proses politik diajukan, termasuk mekanisme komunikasi daring dan diplomasi regional. Selain itu, komite memberikan rekomendasi kepada PBB terkait kebutuhan bantuan teknis dan ekonomi bagi Kaledonia Baru guna menjaga stabilitas selama masa transisi politik. PBB kemudian menindaklanjuti rekomendasi ini dengan mempertimbangkan langkah-langkah dukungan yang diperlukan untuk mencegah krisis lebih lanjut.<sup>33</sup>

Hasil referendum ketiga Kaledonia Baru juga yang telah diadakan pada tahun 2021 menjadi perhatian utama bagi Special Committee on Decolonization. Dalam forum ini, komite menekankan pentingnya dialog terbuka antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-status quo guna mencapai kesepakatan politik yang lebih inklusif. Komite juga mengangkat

---

<sup>31</sup> United Nations. Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee), Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 3 Oktober 2019, A/C.4/74/5, hlm. 1.

<sup>32</sup> United Nations, Report of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for 2020, A/75/23, hlm. 71–77.

<sup>33</sup> Ibid.

isu keterwakilan politik yang tidak seimbang serta dampak dari boikot referendum oleh kelompok pro-kemerdekaan terhadap legitimasi hasil referendum.<sup>34</sup> Tantangan utama dalam referendum ini adalah pandemi Covid-19, yang membatasi partisipasi masyarakat Kanak dalam pemungutan suara. Banyak kelompok masyarakat adat mengalami kesulitan dalam berpartisipasi akibat krisis kesehatan dan ekonomi yang melanda wilayah tersebut. Komite mencatat bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Kanak berkontribusi pada perdebatan mengenai legitimasi hasil referendum, yang kemudian menjadi perhatian utama dalam laporan yang diajukan kepada PBB.<sup>35</sup>

### **Special Committee on Decolonization sebagai Normative: Defining Standards of Behavior**

Special Committee on Decolonization bertanggung jawab dalam menetapkan standar perilaku terkait dekolonisasi, memastikan bahwa setiap proses penentuan nasib sendiri mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB dan Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial (Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples) pada tahun 1960 melalui Resolusi Majelis Umum No.1514 (XV). Deklarasi ini menyerukan diakhirinya kolonialisme dalam segala bentuknya dan menegaskan hak semua bangsa untuk merdeka.<sup>36</sup> Sebelum referendum dilaksanakan pada 2018, komite menegaskan bahwa referendum harus dilaksanakan secara adil, demokratis, dan transparan. Komite mendorong Prancis untuk menjamin bahwa daftar pemilih mencerminkan realitas sosial dan demografis Kaledonia Baru serta memastikan tidak ada hambatan administratif yang merugikan partisipasi rakyat dalam menentukan masa depan mereka.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> United Nations. Report of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for 2021: Draft Resolution XII, Question of New Caledonia, hlm. 89-95.

<sup>35</sup> Simon P.J. Batterbury. The Third Independence Referendum in New Caledonia: A Fallback to Colonialism? Pacific Geographies, 16 Februari 2022, hlm. 11-12.

<sup>36</sup> United Nations, General Assembly Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Resolution 1514 (XV), 14 Des. 1960.

<sup>37</sup> United Nations, Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. 19 Desember. 2017, AC.109/2018/L.1, hlm. 5.

Setelah referendum berlangsung pada tahun 2018, Special Committee on Decolonization terus mengawasi pelaksanaan hasilnya dan menegaskan kembali pentingnya penerapan standar demokrasi yang sesuai dengan Perjanjian Nouméa. Komite juga mencatat adanya perdebatan mengenai daftar pemilih yang memengaruhi legitimasi hasil referendum. Dalam laporannya kepada PBB, komite menyoroti perlunya mekanisme pemantauan independen guna memastikan bahwa semua tahapan proses politik tetap sesuai dengan standar internasional.

Pada tahun 2020, komite kembali menekankan prinsip transparansi dan inklusivitas dalam pelaksanaan referendum kedua. Pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan tambahan dalam menjaga standar demokrasi, terutama terkait dengan akses pemilih terhadap informasi dan partisipasi yang adil. Komite memastikan bahwa meskipun ada pembatasan sosial, hak rakyat Kaledonia Baru harus tetap terlindungi.<sup>38</sup> Dalam laporannya kepada PBB, Special Committee on Decolonization menegaskan bahwa kebijakan kesehatan publik yang diterapkan selama referendum tidak boleh membatasi akses masyarakat terhadap proses demokrasi.<sup>39</sup>

Dalam referendum ketiga pada tahun 2021, Special Committee on Decolonization mengidentifikasi bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Komite mencatat adanya hambatan bagi partisipasi kelompok masyarakat adat Kanak, yang terdampak secara ekonomi dan sosial akibat pandemi. Resolusi 76/98 dari Majelis Umum PBB menegaskan bahwa referendum harus berlangsung secara bebas dan adil, tetapi komite menemukan bahwa rendahnya partisipasi akibat boikot dari kelompok pro-kemerdekaan berpotensi memengaruhi validitas hasil referendum. Oleh karena itu, Special Committee on Decolonization menekankan bahwa perlunya pendekatan berkelanjutan

---

<sup>38</sup> John Connell. The 2020 New Caledonia Referendum: The Slow March to Independence? *The Journal of Pacific History*, vol. 56, no. 2, 29 April. 2021, hlm. 9.

<sup>39</sup> United Nations. Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the Specialized Agencies and the International Institutions Associated with the United Nations: Report of the Secretary-General. 23 Maret. 2020, A/75/73, hlm. 2.

untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi tanpa hambatan eksternal.<sup>40</sup>

Dalam seluruh proses dekolonisasi Kaledonia Baru, Special Committee on Decolonization berperan dalam mengawasi penerapan standar yang ditetapkan oleh PBB. Komite terus menganalisis tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang muncul, serta memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB untuk memastikan bahwa hak penentuan nasib sendiri tetap dihormati. Dengan mengacu pada resolusi PBB dan perjanjian internasional, komite menegaskan bahwa Kaledonia Baru harus terus dipantau agar standar demokrasi, keadilan, dan inklusivitas tetap terjaga dalam setiap tahap proses dekolonisasi.<sup>41</sup>

### **Special Committee on Decolonization sebagai Rule Creation: Drafting Legally Binding Treaties**

Sebagai bagian dari PBB, Komite ini memastikan bahwa implementasi Nouméa Accord berjalan sesuai dengan prinsip hukum internasional serta resolusi yang telah dibuat oleh Majelis Umum PBB. Meskipun bukan sebagai pembuat hukum, Special Committee on Decolonization berperan dalam mendukung penyusunan kebijakan dan perjanjian yang berkaitan dengan proses dekolonisasi Kaledonia Baru. Pada periode 2018-2021, komite mengawal pelaksanaan referendum dengan menyoroti aspek hukum terkait, termasuk transparansi proses pemungutan suara dan keabsahan daftar pemilih.<sup>42</sup>

Dalam koordinasi dengan PBB, komite memberikan rekomendasi kepada Prancis untuk memastikan bahwa semua peraturan mengenai referendum selaras dengan norma-norma internasional. Komite juga mendorong adanya pengawasan independen guna memastikan bahwa mekanisme pemilihan dijalankan secara adil dan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>40</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. 15 Maret 2022, A/AC.109/2022/SR.1, hlm. 2.

<sup>41</sup> Katherine Nickelchok. "Critical Analysis of the Special Committee on Decolonization." 7 April 2017, hlm. 5.

<sup>42</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: New Caledonia. A/AC.109/2018/11, 24 Januari 2018, hlm. 1–22.

yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional. Selain itu, keterlibatan PBB dalam memantau perkembangan politik Kaledonia Baru semakin memperkuat legitimasi setiap tahapan transisi yang berlangsung.<sup>43</sup>

Pandemi Covid-19 menambah kompleksitas dalam penerapan aturan terkait dekolonisasi. Special Committee on Decolonization bersama PBB menyoroti perlunya fleksibilitas dalam mekanisme hukum guna menyesuaikan proses politik dengan situasi darurat global. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi pandemi serta memastikan bahwa hak politik masyarakat, terutama kelompok adat Kanak, tetap terlindungi meskipun terjadi keterbatasan partisipasi dalam referendum.<sup>44</sup> Dalam berbagai sesi diskusi dengan Majelis Umum PBB, Komite mengusulkan langkah-langkah hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh rakyat Kaledonia Baru memiliki kepastian hukum dan diterima oleh komunitas internasional. Komite juga menekankan pentingnya terus menjaga koordinasi antara PBB, Prancis, dan Pemerintah Kaledonia Baru guna menjamin transisi yang stabil dan selaras dengan hukum yang berlaku.

### **Special Committee on Decolonization sebagai Rule Supervision: Monitoring Compliance with Rules, Adjudicating Disputes, Taking Enforcement Measures**

Sebagai pengawas pelaksanaan aturan dalam proses dekolonisasi, Special Committee on Decolonization memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa referendum Kaledonia Baru berlangsung sesuai dengan standar internasional. Komite ini bertindak sebagai pemantau kepatuhan terhadap aturan dengan memastikan bahwa daftar pemilih dikelola secara transparan dan memenuhi persyaratan hukum. Transparansi dalam daftar pemilih menjadi perhatian utama, terutama mengingat adanya perbedaan interpretasi hukum antara berbagai pemangku kepentingan. Untuk menghindari ketidakadilan, Komite mendorong koordinasi erat antara

---

<sup>43</sup> Aurora Almada E Santos, *The Role of the Decolonization Committee of the United Nations Organization in the Struggle Against Portuguese Colonialism in Africa: 1961-1974*, 2012, hlm. 248-260.

<sup>44</sup> Issabella, Leblic. *The Kanak Struggle for Independence: Challenges and Perspectives*. *Journal of Pacific Studies*, vol. 41, no. 1, 2018, hlm. 5-30.

Francis sebagai kekuatan pengelola dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menjamin bahwa seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih mereka tanpa hambatan administratif maupun politis.<sup>45</sup>

Diskusi dalam misi pengawasan juga menyentuh aspek teknis dari pelaksanaan referendum. Salah satu isu penting adalah pendaftaran otomatis sekitar 11.000 pemilih, dimana 7.000 diantaranya memiliki status sipil adat yang diverifikasi melalui pencocokan data sosial seperti asuransi kesehatan, sementara 4.000 lainnya memiliki status sipil biasa. Untuk menjamin akses yang lebih luas terhadap hak pilih, rancangan undang-undang organik baru juga mengatur pendirian tempat pemungutan suara terdesentralisasi, yang memungkinkan warga dari pulau-pulau lain memilih di Nouméa tanpa harus kembali ke daerah asal mereka. Komite mencatat bahwa kesepakatan antarpantai politik untuk menjalankan kampanye pemilu secara adil dan menyeimbangkan eksposur media merupakan langkah positif menuju proses yang lebih inklusif dan berimbang.<sup>46</sup>

Selain melakukan pengawasan terhadap aturan, Special Committee on Decolonization juga memiliki fungsi dalam menyelesaikan perselisihan terkait referendum. Dalam praktiknya, komite menerima laporan mengenai dugaan ketidakwajaran dalam proses pemungutan suara, termasuk keluhan mengenai aksesibilitas dan kemungkinan pengaruh eksternal yang dapat merusak integritas hasil referendum. Untuk meningkatkan kredibilitas pemilu serta mencegah sengketa politik yang berpotensi mengganggu stabilitas Kaledonia Baru, Komite menugaskan pengamat internasional untuk mengawasi jalannya referendum.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> United Nations. Report of the Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for 2022. A/77/23, 2022, hlm. 31.

<sup>46</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Report of the United Nations Visiting Mission to New Caledonia, 12–16 and 19 March 2018. 2 April 2018, A/AC.109/2018/20, hlm. 6-7.

<sup>47</sup> United Nations. Information from Non-Self-Governing Territories Transmitted under Article 73 e of the Charter of the United Nations. 7 Juni 2022, A/AC.109/2022/L.3, hlm. 1–2.

Dari 2018 hingga 2021, Special Committee on Decolonization terus menjalankan pengawasan ketat terhadap implementasi referendum di Kaledonia Baru. Komite menaruh perhatian besar terhadap pembaruan daftar pemilih secara inklusif serta penerapan regulasi pemilu yang mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Namun, munculnya pandemi Covid-19 menambah kompleksitas pengawasan, karena kebijakan pembatasan sosial berisiko membatasi partisipasi pemilih. Dalam menghadapi situasi ini, komite mendorong fleksibilitas dalam mekanisme pemungutan suara guna memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan masa depan politik mereka.<sup>48</sup>

Dalam aspek penegakan aturan, Komite turut mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Prancis dalam memastikan bahwa regulasi referendum diterapkan secara adil, bahkan dalam kondisi pandemi. Hambatan logistik akibat pandemi menjadi tantangan tersendiri, mendorong komite untuk merekomendasikan inovasi dalam metode komunikasi dan pemungutan suara guna menjamin partisipasi yang luas. Sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai mekanisme terbaik dalam menegakkan aturan serta menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Kaledonia Baru.<sup>49</sup>

Sebagai bagian dari pengawasan pasca-referendum, Special Committee on Decolonization menekankan bahwa dampak sosial dan ekonomi dari proses dekolonisasi tidak boleh diabaikan. Dalam laporannya kepada PBB, Komite mencatat bahwa pandemi telah memperburuk ketidaksetaraan ekonomi, terutama dikalangan masyarakat adat Kanak, yang secara historis menghadapi tantangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik. Oleh karena itu, komunitas internasional didorong untuk memberikan dukungan tambahan dalam bentuk bantuan teknis dan

---

<sup>48</sup> United Nations. "Several Speakers Upset by France's Refusal to Postpone Vote amid Pandemic, as Special Decolonization Committee Hears Contesting Reports on Recent New Caledonia Referendum." UN Press, 14 Juni 2022, <https://press.un.org/en/2022/gacol3359.doc.htm>. Diakses 6 Apr. 2025.

<sup>49</sup> United Nations. "Special Committee on Decolonization Approves 20 Draft Resolutions, Concluding 2022 Session, as Chair Hails Greater Interaction with Non-Self-Governing Territories." UN Press, 24 Juni 2022, <https://press.un.org/en/2022/gacol3362.doc.htm>. Diakses 6 Apr. 2025.

ekonomi, guna memastikan stabilitas Kaledonia Baru dalam masa transisi politik yang sedang berlangsung.<sup>50</sup>

### **Special Committee on Decolonization sebagai Operational: Allocating Resources, Providing Technical Assistance and Relief, Deploying Forces**

Sejak Kaledonia Baru kembali dimasukkan dalam daftar Non-Self-Governing Territories PBB pada tahun 1986, Special Committee on Decolonization berperan dalam memberikan dukungan operasional untuk memastikan proses dekolonisasi berjalan sesuai dengan standar internasional. Special Committee on Decolonization sebagai komite bekerja sama dengan PBB dalam menyalurkan bantuan teknis, ekonomi, dan sosial guna mendukung rakyat Kaledonia Baru dalam menentukan masa depan politik mereka. Special Committee on Decolonization bertanggung jawab dalam mengadakan Seminar Regional Tahunan tentang dekolonisasi yang menjadi forum bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai tantangan dan kemajuan dalam proses dekolonisasi, termasuk kesenjangan sosial-ekonomi, partisipasi politik masyarakat adat Kanak, serta tantangan dalam menerapkan Perjanjian Nouméa.<sup>51</sup>

Sebagai bagian dari alokasi bantuan teknis dan operasional, komite juga melaksanakan misi kunjungan lapangan untuk menilai langsung perkembangan di wilayah tersebut. Pada awal tahun 2018, Komite menyelenggarakan misi kunjungan kedua ke Kaledonia Baru, yang bertujuan mengevaluasi persiapan referendum penentuan nasib sendiri serta pelaksanaan rekomendasi dari kunjungan sebelumnya. Misi ini dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 16 Maret 2018 di Kaledonia Baru dan dilanjutkan pada 19 Maret di Paris. Laporan hasil misi tersebut disusun untuk dipublikasikan sebelum pertengahan tahun 2018, agar dapat memberikan panduan netral dan berbasis bukti dalam proses transisi menuju pemerintahan yang lebih mandiri. Biaya misi ini didanai dari

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Question of Sending Visiting and Special Missions to Territories. 7 Juni 2022, A/AC.109/2022/L.5, hlm. 1.

anggaran Special Committee, mencakup partisipasi anggota komite dan staf Sekretariat PBB.<sup>52</sup>

Pada tahun yang sama Special Committee on Decolonization juga menekankan pentingnya penguatan dukungan ekonomi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam Kaledonia Baru agar proses dekolonisasi dapat berjalan stabil. Komite meminta PBB untuk memberikan asistensi teknis dalam pengembangan infrastruktur ekonomi dan administrasi pemerintahan lokal, terutama dalam sektor pertambangan nikel yang menjadi tulang punggung perekonomian wilayah tersebut. Selain itu, komite mencatat keputusan kekuasaan pengelola untuk mengundang Divisi Bantuan Pemilu dari Departemen Urusan Politik Sekretariat PBB guna menjalankan misi dalam mengamati pekerjaan komisi administratif khusus dan komite penasihat ahli dalam penyusunan serta revisi daftar pemilih khusus. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan transparansi dan keabsahan dalam proses pemungutan suara. Komite juga menantikan untuk meninjau rekomendasi mereka serta mendorong Kekuasaan Pengelola agar memfasilitasi kehadiran pengamat internasional, termasuk dari PBB, selama referendum penentuan nasib sendiri Kaledonia Baru pada 4 November 2018.<sup>53</sup>

Dukungan operasional komite semakin diperkuat pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi Kaledonia Baru. Bersama badan-badan PBB lainnya, Special Committee on Decolonization membantu mengoordinasikan pengiriman bantuan kesehatan, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) dan dukungan medis bagi masyarakat adat Kanak yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan.<sup>54</sup> Komite juga mengawasi implementasi protokol kesehatan

---

<sup>52</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Report of the United Nations Visiting Mission to New Caledonia, 12–16 and 19 March 2018. 2 April 2018, A/AC.109/2018/20, hlm. 3.

<sup>53</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with Regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Organization of Work Relevant Resolutions and Decisions of the General Assembly. 22 Desember 2018, A/AC.109/2019/L.1, hlm. 3.

<sup>54</sup> United Nations. Pacific Regional Seminar on the Implementation of the Fourth International Decade for the Eradication of Colonialism: Advancement of the Non-Self-Governing Territories through the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and Beyond, to Be Held in Castries, Saint Lucia, from 11 to 13 May 2022. A/AC.109/2022/19, 2022, hlm. 1–6.

dalam referendum untuk memastikan bahwa hak politik rakyat tidak terhambat oleh pembatasan pandemi. Selain itu, bantuan teknis diberikan untuk mendukung transisi digital dalam administrasi pemerintahan guna memastikan bahwa komunikasi dan pengambilan kebijakan tetap dapat berjalan efektif di tengah krisis global.<sup>55</sup>

Referendum ketiga pada tahun 2021, Special Committee on Decolonization terus berperan dalam mendukung stabilitas pasca-referendum. Dengan mempertimbangkan rendahnya partisipasi pemilih akibat pandemi dan boikot dari kelompok pro-kemerdekaan, Special Committee on Decolonization mendesak kepada PBB agar meningkatkan program bantuan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan sosial yang semakin memburuk. Resolusi 76/98 menegaskan bahwa upaya dekolonisasi harus tetap berjalan dengan mempertimbangkan kondisi lokal, termasuk perlunya kebijakan afirmatif untuk memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam struktur pemerintahan dan ekonomi. Special Committee on Decolonization memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa Kaledonia Baru memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalani proses dekolonisasi.

### **Special Committee on Decolonization sebagai Idea Generation**

Special Committee on Decolonization berfungsi sebagai wadah penciptaan gagasan untuk mempercepat proses dekolonisasi di Kaledonia Baru. Sejak wilayah ini dimasukkan dalam daftar Non-Self-Governing Territories oleh PBB, Komite terus mencari pendekatan inovatif yang memungkinkan masyarakat Kaledonia Baru memperoleh hak penentuan nasib sendiri secara adil dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite secara aktif mengumpulkan pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas Prancis, perwakilan Kaledonia Baru, organisasi regional, serta komunitas internasional, guna merancang

---

<sup>55</sup> United Nations. Official Records: Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee). 4 November 2020, A/C.4/75/SR.9, hlm. 8–15.

kebijakan yang lebih efektif dalam mengawal transisi politik wilayah tersebut.<sup>56</sup>

Pentingnya inovasi dalam mekanisme penentuan nasib sendiri ditekankan oleh Special Committee on Decolonization, terutama pada 2018 ketika perhatian besar diberikan pada perluasan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam konteks ini, partisipasi luas dalam referendum menjadi fokus utama, dengan upaya mendorong eksplorasi berbagai opsi politik yang lebih inklusif. Salah satu gagasan yang dikembangkan adalah memperkuat hubungan Kaledonia Baru dengan organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai bagian dari strategi memperluas kapasitas politik dan ekonomi di tingkat internasional. Selain itu, inovasi dalam mekanisme pemilu turut disoroti, termasuk peningkatan akses informasi politik bagi masyarakat guna memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh rakyat.<sup>57</sup>

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 khususnya 2020-2021 Special Committee on Decolonization turut mengembangkan strategi agar proses demokratisasi tetap berjalan tanpa hambatan. Komite mengajukan berbagai rekomendasi kepada PBB mengenai cara memitigasi dampak pandemi terhadap partisipasi politik, termasuk penyelenggaraan referendum dengan standar kesehatan ketat dan inovasi dalam metode pemungutan suara. Selain itu, Komite mendorong penguatan kerja sama internasional dalam bentuk bantuan teknis dan ekonomi, guna memastikan bahwa Kaledonia Baru memiliki dukungan yang cukup untuk melewati masa transisi politik di tengah kondisi global yang menantang.<sup>58</sup>

Melalui berbagai gagasan ini, Special Committee on Decolonization terus berperan sebagai motor utama dalam merancang pendekatan inovatif terhadap dekolonisasi Kaledonia Baru. Dengan mengembangkan ide atau

---

<sup>56</sup> United Nations. Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples: Dissemination of Information on Decolonization. A/AC.109/2022/L.4, 7 Juni 2022, hlm. 2–3.

<sup>57</sup> Forrest, Martin. Regional Integration as a Path to Independence: New Caledonia and the Melanesian Spearhead Group. *Pacific Affairs*, vol. 93, no. 2, 2020, hlm. 253–274.

<sup>58</sup> United Nations. New Caledonia: Working Paper Prepared by the Secretariat. 26 Maret. 2021, A/AC.109/2021/11, hlm. 1–19.

strategi yang adaptif, Komite memastikan bahwa hak rakyat Kaledonia Baru untuk menentukan masa depan mereka tetap dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum internasional.<sup>59</sup>

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai peran Special Committee on Decolonization The United Nation dalam proses dekolonisasi Kaledonia Baru adalah bahwa komite ini berfungsi sebagai badan khusus PBB yang menjalankan peran penting dalam menegakkan hak penentuan nasib sendiri dan mengakhiri kolonialisme di Wilayah-Wilayah Belum Merdeka (Non-Self-Governing Territories/NSGTs). Selama periode 2018–2021, komite ini aktif memantau pelaksanaan referendum, mengumpulkan dan menganalisis informasi, serta memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB. Selain itu, komite juga memfasilitasi dialog antara Prancis, pemerintah Kaledonia Baru, dan masyarakat adat Kanak guna memastikan proses penentuan status politik wilayah berjalan secara adil, demokratis, dan sesuai prinsip-prinsip hukum internasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, komite menghadapi berbagai tantangan, seperti kontroversi mengenai daftar pemilih, rendahnya partisipasi masyarakat adat, hingga dampak besar dari pandemi Covid-19 yang menghambat jalannya proses politik dan sosial. Ketidakeimbangan representasi serta boikot referendum oleh kelompok pro-kemerdekaan turut menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hasil referendum, khususnya pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan prinsip hukum telah dibangun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan serius yang harus disikapi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif.

---

<sup>59</sup> United Nation. Pacific Regional Seminar on the Implementation of the Fourth International Decade for the Eradication of Colonialism: Innovative Steps to Ensure the Attainment of the Sustainable Development Goals in the Non-Self-Governing Territories, to Be Held in Bali, Indonesia, from 24 to 26 May 2023. 10 Maret 2023. A/AC.109/2023/19, hlm. 1–6.

Secara keseluruhan, dengan melihat peluang untuk memperkuat kapasitas politik lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan masa depan wilayahnya, Special Committee on Decolonization telah memberikan kontribusi yang penting dalam mengawal proses dekolonisasi Kaledonia Baru agar tetap berada dalam koridor hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pemberian bantuan teknis, fasilitasi forum-forum diskusi, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal, komite ini berperan sebagai penggerak utama dalam memastikan bahwa proses transisi politik berlangsung damai, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat. Komitmen komite terhadap prinsip keadilan, inklusivitas, dan hak penentuan nasib sendiri menjadi fondasi kuat bagi masa depan Kaledonia Baru menuju status politik yang sah, adil, dan diakui secara internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alawiyah. Kajian Historis Noumea Accord 1998 Di Kaledonia Baru. Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 8.
- Almada E Santos, Aurora. The Role of the Decolonization Committee of the United Nations Organization in the Struggle Against Portuguese Colonialism in Africa: 1961-1974, 2012, hlm. 248–260.
- Batterbury, Simon P.J. “The Third Independence Referendum in New Caledonia: A Fallback to Colonialism?” *Pacific Geographies*, 16 Februari 2022, hlm. 11–12.
- Betts, Raymond F. “Decolonization: A Brief History of the Word.” *Beyond Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s-1970s*, 2012, hlm. 23–38. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h2zm.5>.
- Chappell, David A. “Frontier Ethnogenesis: The Case of New Caledonia.” *Journal of World History* 4, no. 2 (Fall 1993): 307–324. <https://www.jstor.org/stable/20078566>.

- Chappell, David A. "The Noumea Accord: Decolonization without Independence in New Caledonia?" *Pacific Affairs* 72, no. 3 (Autumn 1999): hlm. 373.
- Christman, Roy. *The United Nations and Decolonization: A Study of the Formation, Organization, and Effectiveness of the Special Committee....* The Pennsylvania State University, 1974. Proquest Dissertations & Theses, hlm. 1-24.
- Connell, John. "The 2020 New Caledonia Referendum: The Slow March to Independence?" *The Journal of Pacific History* 56, no. 2 (29 April 2021): hlm. 9.
- "Referendum 3 of 3: New Caledonia Won't Become Independent." *Political Geography Now*, 17 Desember 2021. [www.polgeonow.com/2021/12/did-new-caledonia-gain-independence-referendum-2021.html](http://www.polgeonow.com/2021/12/did-new-caledonia-gain-independence-referendum-2021.html).
- Faberon, Jean-Yves. "Instability and Stability in New Caledonia." In *Politics, Development and Security in Oceania*, 2013, hlm. 77-82. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt2tt18z.14>.
- Finger, Seymour M. "A New Approach to Colonial Problems at the United Nations." *International Organization* 26, no. 1 (Winter 1972), abstract. <https://www.jstor.org/stable/2705958>.
- Fisher, Denise. *New Caledonia's Independence Referendum: Local and Regional Implications*. JSTOR 54, no. 2 (1 Mei 2019): hlm. 4. <https://www.jstor.org/stable/resrep19787>.
- Forrest, Martin. "Regional Integration as a Path to Independence: New Caledonia and the Melanesian Spearhead Group." *Pacific Affairs* 93, no. 2 (2020): hlm. 253-274.
- Gordon, Lewis. *Freedom, Justice, and Decolonization*. New York: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003112594>.

- Hack, Karl. "Decolonization and Violence in Southeast Asia: Crises of Identity and Authority." In *Beyond Empire and Nation*, 2012, hlm. 137–166.
- Imam, Maudi. "Dekolonisasi." *Jurnal Studia Administrasi MM Dekolonisasi* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47995/jian.v6i1.204>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. 2016. [www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](http://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).
- Laenui, Poka. "Processes of Decolonization." In *Reclaiming Indigenous Voice and Vision*, 2000, hlm. 1.
- Leblic, Issabella. "The Kanak Struggle for Independence: Challenges and Perspectives." *Journal of Pacific Studies* 41, no. 1 (2018): hlm. 5–30.
- Lovelace, Anna. "When Global Governance Wins: The Role of the United Nations in Decolonization." *Merced Undergraduate Research Journal*, hlm. 75.
- Nickelchok, Katherine. "Critical Analysis of the Special Committee on Decolonization." 7 April 2017, hlm. 5.
- O'Sullivan, Christopher. "The United Nations, Decolonization, and Self-Determination in Cold War Sub-Saharan Africa, 1960–1994." *Journal of Third World Studies* 22, no. 2 (2005): hlm. 103–120.
- Seligman, Edwin R. A. "The French Colonial Fiscal System." *Publications of the American Economic Association*, vol. 1, no. 3 (1900): hlm. 21–39. <https://www.jstor.org/stable/2485789>.
- Turner, Oliver. "'Finishing the Job': The UN Special Committee on Decolonization and the Politics of Self-Governance." *Third World Quarterly* 34, no. 7 (2013): hlm. 1–17.
- United Nations. *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, General Assembly Resolution 1514 (XV), 14 Desember 1960.

United Nations. Implementation of the Declaration... Question of New Caledonia, A/RES/75/115, 21 Desember 2020, hlm. 3–7.

United Nations. Implementation of the Declaration... Question of New Caledonia, A/RES/76/98, 16 Desember 2021, hlm. 4–7.

United Nations. Implementation of the Declaration on the Granting of Independence..., 22 Juli 2020, hlm. 6.

United Nations. Implementation... by the Specialized Agencies..., Report of the Secretary-General, A/75/73, 23 Maret 2020, hlm. 2.

United Nations. Information from Non-Self-Governing Territories..., A/AC.109/2022/L.3, 7 Juni 2022, hlm. 1–2.

United Nations. New Caledonia: Working Paper Prepared by the Secretariat, A/AC.109/2021/11, 26 Maret 2021, hlm. 1–19.

United Nations. Official Records: Fourth Committee, A/C.4/75/SR.9, 4 November 2020, hlm. 8–15.

United Nations. Pacific Regional Seminar: Saint Lucia, A/AC.109/2022/19, 11–13 Mei 2022, hlm. 1–6.

United Nations. Pacific Regional Seminar: Bali, Indonesia, A/AC.109/2023/19, 10 Maret 2023, hlm. 1–6.

United Nations. Report of the Special Committee..., A/75/23, 2020, hlm. 71–77.

United Nations. Report of the Special Committee..., Draft Resolution XII: Question of New Caledonia, 2021, hlm. 89–95.

United Nations. Report of the Special Committee..., A/77/23, 2022, hlm. 31.

United Nations. Report of the United Nations Visiting Mission to New Caledonia, A/AC.109/2018/20, 2 April 2018, hlm. 3, 6–8.

United Nations. Special Committee on Decolonization Approves 20 Draft Resolutions..., UN Press, 24 Juni 2022. <https://press.un.org/en/2022/gacol3362.doc.htm>.

United Nations. Special Committee on Decolonization. Diakses 24 November 2024. <https://www.un.org/dppa/decolonization/en/c24/about>.

United Nations. Special Committee on the Situation..., berbagai dokumen 2017–2022, termasuk:

A/AC.109/2018/L.1 (19 Des. 2017)

A/AC.109/2018/11 (24 Jan. 2018)

A/AC.109/2019/11 (8 Mar. 2019)

A/C.4/74/5 (3 Okt. 2019)

A/AC.109/2022/SR.1 (15 Mar. 2022)

A/AC.109/2022/L.4, L.5 (7 Juni 2022)

United Nations. “Several Speakers Upset by France’s Refusal to Postpone Vote amid Pandemic...” UN Press, 14 Juni 2022. <https://press.un.org/en/2022/gacol3359.doc.htm>

“The Special Committee on Decolonization: C-24, Committee Primer, Decolonization and the United Nations.” Mesa Community College. Diakses 28 November 2024. <https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/academic-departments/social-science/C24%20Instructions.pdf>.